

## PELATIHAN PENINGKATAN LITERASI KESEHATAN DALAM MENDISIPLINKAN MASYARAKAT MEMATUHI PROTOKOL KESEHATAN DI KABUPATEN PANGANDARAN

Uud Wahyudin<sup>1</sup>, Hadi Suprpto Arifin<sup>2</sup>, Ilham Gemiharto<sup>3</sup>, Agus Setiaman<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran

E-mail : <sup>1</sup>uud.wahyudin@unpad.ac.id, <sup>2</sup>has@unpad.ac.id, <sup>3</sup>ilham.gemiharto@unpad.ac.id,

<sup>4</sup>agus.setiaman@unpad.ac.id

**ABSTRAK.** Berbagai fakta menunjukkan, bahwa meningkatnya kasus terinfeksi corona Covid 19 disebabkan oleh tidak disiplinnya masyarakat dalam mematuhi 5M protokol kesehatan, maka sudah saatnya pemerintah dalam setiap melakukan komunikasi publik berperan dalam meningkatkan literasi kesehatan masyarakat. Literasi kesehatan masyarakat mengenai pandemi Covid-19 akan meningkat, bila masyarakat berdisiplin dalam menjaga jarak dan mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Pelatihan literasi kesehatan dalam mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan merupakan salah satu upaya yang dilakukan agar penanganan pandemic covid 19 dapat segera terselesaikan sehingga kita bebas dari covid sehingga kehidupan sehari-hari dapat berlangsung secara normal.

**Kata Kunci:** Pelatihan, Komunikasi, Kesehatan, Pandemi

**ABSTRACT.** Various facts show that the increase in cases of Covid-19 infection is caused by the public's indiscipline in complying with the 5M health protocol, so it is time for the government in every public communication to play a role in increasing public health literacy. Public health literacy regarding the Covid-19 pandemic will increase if people are disciplined in keeping their distance and wearing masks, washing hands with soap and running water, staying away from crowds, and limiting mobility and interaction. Health literacy training in disciplining the public in complying with health protocols is one of the efforts made so that overcoming the covid 19 pandemic can be resolved immediately so that we are free from covid so that daily life can take place normally.

**Keywords:** Training, Communication, Health, Pandemic

### PENDAHULUAN

Sejumlah komunikasi publik yang dilakukan pemerintah banyak yang meremehkan Covid-19 sehingga menggelisahkan dan membingungkan masyarakat. Menurut Lato dkk (2020) banyaknya informasi yang tidak jelas, ambigu serta tidak akurat selama pandemi Covid-19 dapat menyebabkan informasi yang berlebihan dan meningkatkan kemungkinan salahnya informasi yang dibagikan serta peningkatan kecemasan pada konteks kesehatan. Adanya kecemasan yang tidak perlu tersebut berpotensi membuat Individu yang merasa ketakutan mengarah pada keadaan psikosomatis.

Dalam konteks ini, peran strategis komunikasi publik dapat menyelaraskan ragam informasi yang simpang siur serta seringkali mengalami kebuntuan di berbagai tingkatan meskipun banyak juga informasi yang benar. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini dibutuhkan pihak-pihak yang memainkan dan menjalankan peran komunikasi publik secara baik dengan tujuan mengharmonikan informasi beragam yang tidak jarang sulit dimengerti

masyarakat sehingga membuat miskomunikasi bahkan disinformasi.

Dalam menjaga kestabilan kondisi di tengah wabah covid-19 ini, pemerintah tetap harus melaksanakan tugasnya dalam menyampaikan kondisi yang terjadi saat ini. Dimana pemerintah harus mengedukasi apa itu covid-19, bagaimana penyebarannya, bagaimana langkah yang akan diambil pemerintah dalam menangani kasus tersebut. Semuanya dikomunikasikan secara gamblang kepada masyarakat. Gunanya adalah agar masyarakat melek akan lingkungan yang terjadi di sekitar dan menjaga diri demi kesehatan bersama, bersama-sama melawan pandemi ini. Sehingga, dengan adanya keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan himbuan yang diberikan pemerintah akan dilaksanakan dengan baik.

Hasil penelitian Oktarini dkk. (2020) memperkuat pendapat, bahwa ketika membahas komunikasi bencana, khususnya pandemi, ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki yaitu: (1) Mengomunikasikan tentang kebijakan; (2) institusi dan *disaster communication pattern*;

(3) Isu kebencanaan disampaikan melalui strategi yang tepat untuk menyebarkan informasi dan umpan balik yang dinamis. Dengan demikian, komunikasi publik memang seharusnya dilakukan secara cermat dan efektif, serta direncanakan secara matang sehingga ketika krisis terjadi, pemerintah sudah siap merespon krisis yang terjadi.

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Pemerintah diharapkan dapat menyebarkan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di daerah terpencil. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan seperti Website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kemenkes khusus untuk COVID-19, Televisi, Media Cetak, Media Online, Radio, SMS gateway, Media Sosial, Jaringan sekolah, Jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik, Jaringan informal lainnya. Hal ini berguna untuk mengkampanyekan protokol kesehatan yang diusung kementerian kesehatan, dan penyebaran informasi terkait jumlah data pasien terpapar virus hingga pasien yang sembuh. Narasi utama dalam penyampaian komunikasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada masyarakat yaitu: “Pemerintah Serius, Siap dan Mampu Menangani COVID-19” “Masyarakat Tetap Tenang dan Waspada” “COVID-19 Bisa Sembuh” sehingga terjadi kepercayaan Antara pemerintah dan masyarakat.

Informasi mengenai Covid-19 di Indonesia bisa kita lihat melalui berita baik itu Televisi, koran ataupun media sosial. Sangat diharuskan bagi kita untuk selalu memfilter setiap Informasi yang diterima dengan melihat apakah informasi atau data tersebut benar (valid) atau tidak. Karena jika informasi yang kita dapat langsung kita cerna tanpa tahu kebenarannya, itu dapat menimbulkan kesalahpahaman. Untuk itu, pentingnya komunikasi yang baik dan efektif antara pemerintah dan masyarakat supaya dapat meminimalisir Informasi atau data palsu yang tersebar.

Namun banyaknya informasi yang beredar dan diterima justru membuat masyarakat merasakan kepanikan dan ketakutan. Oktariani (2020) menyebutkan adanya kemungkinan terjadinya *over abundance of information* atau tumpah ruah informasi pada pandemic COVID 19 yang melanda Indonesia. Hal tersebut merupakan bentuk dari krisis komunikasi sebab adanya ketidakselarasan antara harapan dan kekecewaan.

WHO juga menyadari adanya krisis komunikasi dan menyebutnya sebagai “*infodemic*”. WHO menyoroti infodemic sebagai krisis komunikasi yang timbul dari banyaknya informasi yang salah serta berita palsu yang beredar tentang COVID-19 (Lato dkk., 2020). Banyaknya informasi yang beredar berpotensi menghadirkan informasi yang bersifat bias dan membingungkan.

Salah satu upaya untuk meningkatkan literasi kesehatan terlebih informasi tentang covid19 maka diperlukan pelatihan literasi kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pandemic covid19 dalam mematahui protocol kesehatan. Pilihan objek pelatihan di Pangandaran mengingat Kabupaten Pangandaran adalah area wisata yang terbuka interaksinya dengan dunia luar.

## KAJIAN LITERATUR

Dalam konteks ini, sebagai upaya menekan penyebaran Covid-19, aspek mengenai komunikasi kesehatan menjadi fokus utama. Komunikasi kesehatan adalah komunikasi yang dilakukan di ranah kesehatan untuk mendorong tercapainya keadaan atau status yang sehat secara utuh baik fisik, mental maupun sosial.

Ada urgensi ingin menjadikan komunikasi bukan sekadar berperan di pinggiran selama masa pandemi melainkan sama utamanya dengan penanganan kesehatannya itu sendiri. Dengan perkataan lain, ingin mendudukan peran strategis komunikasi dalam penanggulangan pandemi di era masyarakat informasi. Tanpa mengecilkkan peran bidang lain, aspek komunikasi memainkan peran fundamental dalam mengatasi pandemi Covid-19 sebab corona bukan hanya soal kesehatan melainkan peristiwa komunikasi yang tersebar secara global yang memiliki dampak luas dalam kehidupan masyarakat termasuk di Indonesia.

Tingkat pendidikan, budaya, bahasa menentukan literasi kesehatan individu (Wahyudin, 2018). Penggunaan informasi oleh individu dalam hal menjaga kesehatannya juga menjadi gambaran tentang literasi kesehatan individu. Nutbeam (2000) menulis *health literacy*, dalam hal pemberdayaan kesehatan setiap individu, literasi kesehatan menjadi variabel penting. Sementara itu, *Institute of Medicine* (2009), memaknai literasi kesehatan sebagai upaya menanggulangi permasalahan kesehatan dan penyakit melalui bagaimana individu memiliki kemampuan dalam

memperoleh, memproses, dan memahami informasi kesehatan dasar serta kebutuhan untuk pelayanan kesehatan.

Menurut pengertian *Public Health in the 21st Century: Health Literacy in Context: International Perspectives*. (2012), bahwa literasi kesehatan adalah derajat kemampuan seseorang untuk mendapat, memproses, serta memahami informasi kesehatan dasar dan pelayanan yang dibutuhkan untuk membuat keputusan terkait kesehatan yang sesuai.

Literasi kesehatan meliputi kapasitas masyarakat, keterampilan, pengetahuan dan motivasi untuk mengakses, memahami, menilai dan menerapkan informasi kesehatan dalam bentuk yang berbeda, untuk membentuk penilaian dan pengambilan keputusan dalam hal menggunakan sistem pelayanan kesehatan, pencegahan penyakit dan promosi kesehatan, untuk meningkatkan kualitas hidup sepanjang perjalanan kehidupannya (*European Health Literacy Consortium, 2013*). Literasi kesehatan juga menggambarkan kemampuan kognitif dan keterampilan sosial yang dapat diartikan sebagai motivasi dan kemampuan individu untuk mengakses, memahami dan menggunakan informasi dalam hal menjaga kesehatannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran strategis komunikasi publik dapat dikelola secara lebih baik dan efektif karena aspek komunikasi yang positif diharapkan mampu mengedukasi masyarakat tidak hanya pada tingkatan pengetahuan tetapi juga mempengaruhi sikap masyarakat sehingga menjadi tuntunan, jembatan atas berbagai kendala dalam mengatasi pandemi Covid-19 dan bahkan memecah ragam persoalan Covid-19 seperti perbedaan pandangan pemangku kebijakan penanganan pandemi, kepanikan publik atas exposure informasi yang tinggi, miskomunikasi, disinformasi, hoaxes, stigma, blunder komunikasi otoritas, ketidakpastian informasi, kebenaran informasi, dan kurangnya data yang lebih berkualitas, serta kesan kurang kompaknya antar warga bangsa dalam melawan pandemi Covid-19 ragam problematika (komunikasi) yang terjadi selama pandemi Covid-19 harapannya dapat diselesaikan dengan peran efektif komunikasi yang dijalankan.

Masalah komunikasi kesehatan sebenarnya melekat pada hubungan konseptual antara komunikasi dengan kesehatan sehingga konsep komunikasi memberikan peranan pada kata yang mengikutinya. Komunikasi kesehatan

adalah: studi yang mempelajari bagaimana cara menggunakan strategi komunikasi untuk menyebarkan informasi kesehatan yang dapat memengaruhi individu dan komunitas agar mereka dapat membuat keputusan yang tepat berkaitan dengan pengelolaan kesehatan. Atau dapat pula didefinisikan sebagai studi yang menekankan peranan teori komunikasi yang dapat digunakan dalam penelitian dan praktik yang berkaitan dengan promosi kesehatan dan pemeliharaan kesehatan (Liliweri, 2009:48).

Komunikasi kesehatan merupakan pendekatan dari berbagai segi dan berbagai disiplin ilmu untuk menggapai berbagai macam sasaran dan berbagi informasi kesehatan dengan cara mempengaruhi, menarik perhatian dan mendukung individu, komunitas, tenaga medis, kelompok khusus, pembuat kebijakan, pemuka masyarakat untuk memperjuangkan, memperkenalkan, mengadopsi, mempertahankan perilaku, perbuatan, kebijakan yang akhirnya mengembangkan hasil yang sehat.

*Health communication is a process for the development and diffusion of messages to specific audiences in order to influence their knowledge, attitudes, and beliefs in favor of healthy behavior choices (Smith and Hornik, 2006)*

Komunikasi kesehatan di definisikan dengan beragam sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam proses komunikasinya. Tujuan komunikasi kesehatan untuk memberi informasi dan mempengaruhi keputusan individu atau komunitas, terlihat dalam definisi yang diberikan oleh *New South Wales Department of Health, Australia*: “*Health communication is a key strategy to inform the public about health concerns and to maintain important health issues on the public agenda*” (Schiavo, 2007:8). Sedangkan definisi komunikasi kesehatan yang lain bertujuan untuk mengubah perilaku dapat dilihat dari definisi komunikasi kesehatan yang disampaikan Clift dan Freimuth dalam Schiavo bahwa “*health communication, like health education, is an approach which attempts to change a set of behaviors in a large scale target audience regarding a specific problem in a predefined period of time.*”

Salah satu model komunikasi kesehatan yang bisa dijadikan *guidance* dalam penelitian ini adalah Model Keyakinan Kesehatan (*Health Belief Model*) yang menjelaskan kondisi-kondisi yang sangat diperlukan bagi terjadinya suatu perubahan perilaku. Model ini menjelaskan kondisi-kondisi yang sangat diperlukan bagi

terjadinya suatu perubahan perilaku. Meski terlihat mengkhususkan diri pada perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, ternyata model ini dapat digunakan untuk menganalisis berbagai pemikiran yang harus ditumbuhkan dalam diri khalayak melalui pesan-pesan kampanye, agar terjadi perubahan perilaku sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut model ini, manusia akan mengambil tindakan untuk mencegah, menyaring, dan mengontrol berbagai kondisi dirinya dengan berdasarkan pada sejumlah faktor. (1) persepsi akan kelemahan (*perceived susceptibility*); artinya individu percaya dan merasa bahwa dirinya berpeluang terkena penyakit atau kondisi tertentu. (2) persepsi risiko (*perceived severity*); individu percaya bahwa bila penyakit itu menimpa akan membawa suatu kondisi yang sulit dan tidak menyenangkan. (3) persepsi akan keuntungan (*perceived benefits*); individu percaya bahwa perilaku preventif dapat mengurangi kerugian atau akan membawa suatu konsekuensi positif. (4) persepsi akan rintangan (*perceived barriers*); individu percaya bahwa biaya yang nyata atau bersifat kejiwaan dari pembentukan perilaku mempunyai keuntungan yang lebih banyak daripada pengorbanan yang harus dilakukan. (5) Isyarat-isyarat untuk bertindak (*cues to action*); individu harus dapat menghadapi dan mempunyai keinginan menggerakkan dirinya sebagai sebuah kesiapan untuk membentuk suatu perilaku. (6) Kemampuan diri (*self efficacy*); individu percaya bahwa dirinya bisa melakukan tindakan yang harus dilakukan.

Sebagai suatu strategi komunikasi dalam perubahan sosial dan pembangunan, dibutuhkan langkah-langkah operasional dalam penerapannya dengan melibatkan berbagai pihak yang berkompeten dan berkepentingan (*stakeholders*) sehingga seluruh program pembangunan bisa berjalan sesuai tujuannya. Oleh karena itu, dibutuhkan tenaga-tenaga terampil dan profesional, baik perorangan maupun kelompok yang pajam di bidangnya masing-masing. Melalui tenaga-tenaga terdidik atau terampil, diharapkan dapat memelopori, menggerakkan, membuka wawasan berpikir, ataupun menyebarluaskan proses perubahan tersebut. Para tenaga tersebut memiliki kualifikasi dan kemampuan sehingga disebut agen perubahan. Para agen ini bisa saja berasal dari pemerintah atau NGO. Menurut Rogers dan Shoemaker (1971), agen perubahan merupakan tugas profesional yang memengaruhi suatu putusan pada inovasi menurut arah yang diinginkannya. Dengan demikian, mereka

menyimpulkan fungsi para agen perubahan ini dipandang sebagai mata rantai komunikasi antara dua atau lebih sistem sosial. Sementara penyuluh menurut Everett M. Rogers adalah seseorang atas nama pemerintah atau lembaga penyuluhan yang berkewajiban memengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sasaran penyuluhan untuk mengadopsi suatu inovasi (penemuan) (Nunik S. Rejeki dan Anita F. Herawati, 1999).

Pada tataran pragmatis, fungsi agen perubahan ini meliputi fungsi pemberi-penerus informasi dan penghubung serta penjelas. Untuk tujuan tersebut, posisi dan status para agen perlu dibedakan antara orang dalam (*insiders*) atau orang luar (*outsiders*). Tidak jarang dalam banyak kasus, para agen pembangunan berasal dari dalam lingkungan masyarakat sehingga mempermudah usaha persuasi dalam penerimaan ide pembangunan. Mereka diyakini mengetahui seluk beluk karakteristik masyarakat tersebut. Bila hal ini dapat dilakukan, peran dan fungsi agen pembangunan dapat berjalan mencapai tujuan.

## KESIMPULAN

1. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk implementasi program kedisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Kegiatannya dilakukan melalui pendekatan komunitas pada generasi milenial.
2. Terkait dengan penanganan Covid-19, Pemerintah Kabupaten Pangandaran Jabar harus membangun literasi kesehatan bagi masyarakat tentang bahaya corona yang mengancam nyawa dan upaya penanganannya dengan memberikan informasi yang akurat, transparan, dan intensif.
3. Keberhasilan literasi kesehatan ditentukan oleh kredibilitas Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang meliputi kecepatan merilis informasi dan akurasi informasi bahaya yang mengancam nyawa dari Covid-19. Selain itu, Pemerintah/Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 harus membangun kepercayaan publik dengan memberikan informasi yang akurat, transparan, empati dan rutin tentang bahaya Covid-19.

## Saran-Saran

1. Dalam situasi pandemi Covid-19, pesan kampanye atau sosialisasi literasi kesehatan harus disampaikan secara tepat, pada waktu

yang tepat, dari orang yang tepat sehingga dapat menyelamatkan nyawa (*the right message at the right time from the right person can saves lives*). Pastikan pesan kampanye atau sosialisasi literasi bersifat singkat, cepat, akurat, dan disampaikan dengan empati.

2. Pahami masyarakat dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman dan penerimaan pesan kampanye atau sosialisasi. Masyarakat Jabar memiliki prioritas kebutuhan informasi corona yang berbeda tergantung pada hubungan mereka dengan situasi pandemi Covid-19.

### DAFTAR PUSTAKA

- European Health Literacy Concorcium. (2013). *Health Literacy* (HLS-EU).
- Institute of Medicine.(2009). *Health Literacy: A prescription to end confusion.*, 32-33.
- Islam, A. N., Laato, S., Talukder, S., & Sutinen, E. (2020). *Misinformation sharing and social media fatigue during Covid-19: An affordance and cognitive load perspective*. *Technological Forecasting and Social Change* , 1-14.
- Nutbeam D. (2000). *Health Literacy as a public health goal: a Challenge for contemporary health education and communication strategies into the 21 st century*. *Health Promotion international*, 15(3), 259-267,
- Rika Oktariani, A., & Wuryanta, E. W. (2020). *Komunikasi Pemerintah Melalui Media Centre Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kepada Publik*. *Jurnal Ilmu Komunikasi* , 113-122.
- <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-sains-kebijakan/1419-peran-parlemen-dalam-menciptakan-collaborative-governance-berbasis-pendekatan-penta-helix-stakeholder-untuk-mengatasi-pandemi-covid-19>
- Wahyudin, Uud. 2018.*Komunikasi Kesehatan*. Bandung: Unpad Press.
- Wahyudin, Uud. 2021. *Komunikasi Keluarga vs Covid*. *Pikiran Rakyat*, 29/6/2021
- Wahyudin, Uud.2021. *Komunikasi Harapan vs Covid*. *Pikiran Rakyat*, 5/8/2021